

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN / RAHASIA
KELURAHAN KALIDERES KECAMATAN KALIDERES
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PENTINGNYA BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
1	Informasi data bantuan sosial dan data keluarga miskin	Peraturan Menteri Sosial Nomor. 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan data penerima bantuan sosial	- Tidak terjaga data privasi dan keamanan individu - Terjadi stigma sosial - Terjadi penipuan dan penyalahgunaan - Mengancam keamanan nasional - Tidak ada transparansi dan akuntabilitas.	- Menjaga data privasi dan keamanan individu - Menjaga stigma sosial - Mencegah Terjadi penipuan dan penyalahgunaan - Menjaga keamanan nasional - transparansi dan akuntabilitas	- Tidak terbatas kecuali ada izin dari instansi terkait
2	Perencanaan dan pelaksanaan keuangan dan anggaran kelurahan	- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat (2) anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun berdasarkan azas keterbukaan, kemandirian, dan tanggung jawab, serta kerahasiaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara Pasal 28 (ayat 1) "pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara tertutup, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tujuan perencanaan pembangunan di kelurahan yang tidak berkelanjutan dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan dapat menimbulkan : - Hilangnya kepercayaan masyarakat - Kerugian keuangan negara - Gangguan keamanan - Menghambat proses perencanaan - Potensi pelanggaran hukum	- Mencegah pelanggaran informasi pribadi - Mencegah informasi rincian rekening bank yang hanya boleh diketahui oleh instansi tertentu - Mendukung perencanaan keuangan yang bersifat rencana strategis wilayah - Menghindari penyalahgunaan informasi - Menjaga persaingan tidak sehat saat pelaksanaan anggaran - Menjamin efisiensi pengelolaan keuangan - Meningkatkan kepercayaan masyarakat - Membangun keunggulan strategis - Mengamankan proyek strategis yang belum diumumkan	- Tidak terbatas kecuali ada izin dari instansi terkait

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PENTINGNYA BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
3	Salinan surat pernyataan ahli waris yang telah di registrasi oleh Kelurahan dan Kecamatan	- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4 - Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 85	- Dapat menimbulkan gugatan dan konsekuensi hukum - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi karena seluruh data pribadi tercantum dalam surat pernyataan waris	Melindungi data informasi penduduk.	- Tidak terbatas kecuali mendapat persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris atau diminta oleh aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan atau proses peradilan
4	Data Pribadi dan Identitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	- Dapat mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	- Tidak terbatas kecuali mendapat persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris atau diminta oleh aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan atau proses peradilan
5	Relaas persidangan yang diberikan oleh pihak Pengadilan kepada Kelurahan sebagai arsip	- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 4	- Dapat menimbulkan gugatan dan konsekuensi hukum	Melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses peradilan	- Tidak terbatas kecuali mendapat persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris atau diminta oleh aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan atau proses peradilan
6	Informasi pertanahan (Catatan Letter C dan Buku Pertanahan yang menyangkut identitas pemilik aset beserta informasi aset yang dimiliki	- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 4	- Dapat menimbulkan gugatan dan konsekuensi hukum	Melindungi hak dan kepentingan pemilik aset	- Tidak terbatas kecuali mendapat persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris atau diminta oleh aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan atau proses peradilan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PENTINGNYA BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN
			JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
7	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	- Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	- Dapat menghasilkan penyedia barang/jasa yang berkualitas dan kompeten	- Tidak terbatas kecuali mendapat persetujuan tertulis dari seluruh ahli waris atau diminta oleh aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan atau proses peradilan
8	Dokumen SPJ Keuangan yang belum di audit	- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3 - Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	- Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; - Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang	- Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan; dan - Melindungi data dan informasi pribadi	- Terbuka sampai Audit Keuangan selesai; dan - Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis



Jakarta, 15 Juli 2025
PPID Kelurahan Kalideres,

Anto

NIP 197906012007011021